



Konflik yang Tak Kunjung Usai: Studi Multispesies Petani dan Monyet Ekor Panjang lewat Ekologi Politik Kritis

Rifki Afwakhoir^{1*}

Magister Antropologi, Universitas Gadjah Mada

Abstrak: Penelitian ini ingin menguraikan mengapa masalah perambanan monyet ekor panjang (MEP) di Gunungkidul belum dapat diatasi lewat etnografi multispesies untuk menggali relasi petani lokal dengan MEP kemudian dihubungkan dengan perspektif ekologi politik dengan melihat bagaimana institusi pemerintah merespons dan merepresentasikan masalah perambanan MEP. Pada penelitian ini kita dapat melihat relasi petani dusun Abang dengan MEP sudah terjalin sejak zaman dahulu dan hanya meramban di sekitar sarang mereka. Namun, dalam 10 tahun terakhir, perambanan oleh MEP menyebar sehingga dirasakan seluruh petani secara kolektif. Hilangnya habitat MEP akibat pembangunan infrastruktur pariwisata di Gunungkidul menjadi penyebab masalah ini sehingga MEP perlu mencari habitat lain, terutama dekat dengan pertanian masyarakat. Rehabilitasi habitat MEP dengan menanam tanaman buah yang menjadi solusi yang sulit diwujudkan. Para petani dengan kondisi ekonomi miskin tidak memiliki biaya untuk melakukan hal tersebut secara mandiri. Dalam merespons masalah ini, pemerintah kelurahan sudah menyerah. Instansi pemerintah tingkat kabupaten pun hanya memberikan saran tanpa bantuan penanganan yang nyata. Ketika dinas kehutanan mencoba melakukan rehabilitasi habitat MEP justru mendapat penolakan dari petani karena adanya konflik antara petani dan dinas Kehutanan yang sudah berlangsung lama. Di sisi lain, pemerintah pusat masih memandang bahwa MEP sebagai sumberdaya yang masih melimpah dan bisa diekspor. Berbagai tingkat instansi pemerintah masih merepresentasikan MEP sebagai hama pengganggu kehidupan petani miskin yang banyak jumlahnya yang membuat rehabilitasi habitat belum menjadi fokus. Penelitian ini menyarankan pihak pemerintah untuk menempatkan MEP sebagai korban sehingga dapat mendorong kebijakan politik yang memperhatikan ruang hidup mereka dengan keterlibatan petani lokal di dalamnya.

Katakunci: Multispesies, Ekologi Politik, *Macaca Fascicularis*, Gunungkidul

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3261>

*Correspondence: Rifki Afwakhoir

Email: rifki.a@mail.ugm.ac.id

Received: 06-04-2026

Accepted: 12-05-2026

Published: 28-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to explain why the problem of long-tailed macaque (LTM) foraging in Gunungkidul has not been resolved through multispecies ethnography. This study examines the relationship between local farmers and the LTM, then connects it to a political ecology perspective by analyzing how government institutions respond to and represent the LTM foraging problem. In this study, we can see that the relationship between Abang Hamlet farmers and LTM has existed since ancient times, and they only browse around their nests. However, over the last 10 years, LTM foraging has spread and is now collectively felt by all farmers. The loss of MEP habitat due to tourism infrastructure development in Gunungkidul is the cause of this problem, forcing LTM to seek alternative habitats, especially near community agriculture. Rehabilitating the LTM habitat by planting fruit trees is a difficult solution. Farmers with poor economic conditions do not have the funds to rehabilitate independently. In responding to this problem, the village government has given up. District government agencies only provide suggestions without any real assistance. When the Forestry Service attempted to rehabilitate LTM habitat, they were met with resistance from farmers due to the long-standing conflict between them. On the other hand, the central government still views LTM as an abundant resource that can be exported. Various levels of government agencies continue to portray LTM as a pest that disrupts the lives of many poor farmers, preventing habitat rehabilitation from becoming a priority. This research suggests that the government should position MEPs as victims to encourage political policies that address their living space, with the involvement of local farmers.*

Keywords: *Multispesies, Political Ecology, Macaca Fascicularis, Gunungkidul*

Pendahuluan

Profesi jurnalis di berbagai belahan dunia kini berada di bawah tekanan besar akibat pesatnya perkembangan *artificial intelligence* (AI) yang mampu mengotomatisasi proses produksi berita serta mempercepat distribusi konten digital secara luas (Radcliffe, 2025). Salah satu tantangan paling serius yang muncul adalah meningkatnya peredaran berita palsu (disinformasi), yang semakin sulit dikendalikan karena AI dapat menghasilkan teks dan narasi yang tampak meyakinkan namun menyesatkan (Gutiérrez-Caneda et al., 2024; Hasyim, 2025). Di sisi lain, muncul persoalan etika yang kompleks terkait keterbukaan algoritma, potensi bias dalam sistem teknologi tersebut, serta berkurangnya sentuhan kemanusiaan dalam praktik jurnalistik (Chen, 2025). Kondisi ini menuntut para jurnalis untuk memperkuat kapasitas verifikasi dan menegakkan prinsip integritas dalam setiap proses penyajian informasi kepada publik.

Penerapan *artificial intelligence* dalam industri media menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai negara, baik di kawasan maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa maupun di sejumlah negara berkembang. Beragam platform dan lembaga pemberitaan telah memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung proses otomatisasi penulisan berita rutin, transkripsi audio-visual, hingga personalisasi konten bagi audiens. Meskipun demikian, kemajuan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait berkurangnya peran tenaga kerja, termasuk jurnalistik (Aliwijaya & Suyono, 2023; Sonni, 2025; Inayah et al, 2024). Seiring dengan itu, berbagai regulasi mengenai pemanfaatan AI di bidang jurnalisme terus dikembangkan. Misalnya, EU AI Act yang menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas sesuai laporan Timcke, (2023) serta kebijakan di Tiongkok yang mengutamakan kepatuhan terhadap standar etika dan keamanan informasi (Antara, 2025). Regulasi semacam ini menjadi krusial untuk menyeimbangkan dorongan inovasi teknologi dengan upaya perlindungan terhadap profesionalisme dan keberlanjutan profesi jurnalis.

Dalam konteks jurnalistik, *artificial intelligence* berfungsi sebagai teknologi yang mampu mengotomatisasi proses produksi dan distribusi berita melalui penerapan *Natural Language Generation* (NLG), *machine learning*, serta analisis big data (Chen, 2025; Sonni, 2025). Pemanfaatan teknologi ini menghadirkan efisiensi signifikan dalam kegiatan redaksional, khususnya dalam pengolahan data yang kompleks dan penyajian informasi secara cepat (Aliwijaya, 2023; Ijnet.org, 2025). Namun demikian, integrasi AI juga memunculkan tantangan baru seperti berkurangnya peran manusia dalam pengambilan keputusan editorial dan potensi menurunnya kualitas narasi yang sarat nilai sosial maupun budaya (Gutiérrez-Caneda et al., 2024). Oleh karena itu, AI sebaiknya diposisikan sebagai instrumen pendukung yang memperkuat kinerja jurnalis, bukan menggantikannya, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara manusia dan mesin guna menjaga mutu, integritas, dan etika dalam praktik jurnalistik modern.

Sejumlah penelitian internasional telah mengkaji dampak *artificial intelligence* terhadap profesi jurnalis, terutama dalam dimensi otomatisasi, etika, serta konsekuensi sosial-ekonomi. Berdasarkan pendekatan kuantitatif, Shabrina et al. (2025) melaporkan melalui analisis bibliometric khusus membahas isu-isu seperti misinformasi, otomatisasi produksi berita, dan tata kelola etis penggunaan AI dalam jurnalisme sepanjang periode 2010 hingga 2025. Mayoritas penelitian tersebut berasal dari kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Sementara itu, Molla & Ahsan (2025) melaporkan representasi studi

dari negara-negara di Global South masih relatif terbatas. Beberapa studi terbaru meneliti hubungan antara kecerdasan buatan dan jurnalisme dengan pendekatan bibliometrik. Sonni, Putri, dan Irwanto (2024) menganalisis 331 artikel Scopus periode 2019–2023 dan menemukan peningkatan publikasi dengan dominasi Amerika Serikat, Spanyol, dan Inggris serta topik utama berita palsu, algoritma, dan etika. Karaman dan Yıldırım (2025) mengkaji 71 publikasi Web of Science dan menemukan peningkatan perdebatan etika terkait transparansi dan akuntabilitas. Sharma dkk. (2024) menelaah 73 studi periode 2015–2024 dan menyoroiti penerapan AI serta dampak global otomatisasi. Zorina (2025) meneliti 216 publikasi 2013–2024 dan menemukan lonjakan penelitian sejak 2020 akibat munculnya jaringan saraf dan model generatif seperti ChatGPT. Meskipun telah banyak yang mengkaji terkait jurnalisme dan artificial intelligence, namun terdapat kesenjangan minimnya pemetaan riset tantangan jurnalis, serta bagaimana profesi jurnalis beradaptasi terhadap transformasi teknologi.

Melihat pesatnya perkembangan teknologi *artificial intelligence* di industri media, penelitian mengenai tren riset, etika dan tantangan jurnalistik di era AI menjadi semakin krusial (Sonni, 2025). Kajian semacam ini berperan penting dalam menyediakan dasar ilmiah dan konseptual bagi perumusan kebijakan publik, pengembangan program pelatihan dan pembentukan etika jurnalistik di era digital (Chen, 2025; Gutiérrez-Caneda et al., 2024). Pemahaman yang mendalam mengenai isu ini juga diperlukan untuk meminimalkan risiko erosi kepercayaan publik terhadap media. Pemahaman ini bertujuan pada penerapan teknologi AI berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat global. Dengan demikian, studi bibliometrik tentang AI dalam jurnalisme berkontribusi pada pengembangan jurnalisme, khususnya dalam penguatan tata kelola media yang beretika dan humanistik di tengah transformasi digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan melakukan analisis bibliometrik terhadap publikasi ilmiah terindeks Scopus yang membahas tantangan profesi jurnalis di era *artificial intelligence* (AI). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peta menyeluruh mengenai tema, tren riset, dan sebaran wilayah kajian. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis bagi peneliti, jurnalis, dan pembuat kebijakan. Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian ini adalah “Bagaimana tren penelitian terkait tantangan dan problematika profesi jurnalis di era *artificial intelligence* (AI) pada artikel-artikel terindeks Scopus tahun 2020-2025?”.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi multispesies yang berlangsung dari 13 Juni – 13 Juli di dusun Abang, Kabupaten Gunungkidul. Pengambilan data dilakukan dengan berbagai teknik. Pertama dengan observasi partisipatif yang mengikuti Tsing (2015) *art of noticing*. Observasi tidak hanya merekam kondisi sosial, ekonomi, kultural dan relasi petani dengan MEP, pun memperhatikan lanskap serta berbagai macam agensi yang ada di dalamnya. Kedua, adalah wawancara mendalam para petani dengan memperhatikan keberagaman gender dan usia serta institusi pemerintah lokal (kelurahan, padukuhan, dan pihak kehutanan negara). Terakhir, adalah studi arsip dari berbagai dokumen ataupun pernyataan institusi pemerintah dalam merespons serta merepresentasikan MEP (Robinson, 2012: 173). Selain

itu, studi arsip ini juga untuk mempelajari cara hidup agensi non-manusia yang tidak dapat ditangkap lewat observasi (Swanson, 2014).

Inform Consent

Dengan mempertimbangkan konsen yang diberikan, seluruh nama tempat lokal (hingga tingkat desa), dan interlokutor akan disamarkan. Hal ini tidak lepas untuk keamanan para intelokutor mengingat adanya konflik yang sedang berlangsung di area penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Masyarakat Dusun Abang

Secara Topografi, area dusun Abang berada di perbatasan antara Zona Ledok Wonosari dan Pegunungan Sewu. Keberadaan sungai yang mengalir dari timur ke barat menjadi pembatas alam zona tersebut. Bagian selatan sungai merupakan wilayah dusun Abang dan *talun/pekulen*¹ masyarakat dengan karakteristik topografi pegunungan Sewu, yang dipenuhi bukit-bukit kapur yang terjal. Berbeda halnya dengan sisi utara sungai yang merupakan tanah milik kehutanan dengan karakteristik Zona Ledok Wonosari, yang sudah tidak tampak bukit-bukit kapur dan tanahnya cenderung lebih datar.

Masyarakat dusun Abang merupakan masyarakat desa yang hidup di sekitar hutan (*forest villager*) karena menurut Pak Lurah Kasman mayoritas tanah yang berada disana adalah milik kehutanan yang penuh diisi oleh jati (*Tectona grandis*). Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani skala kecil (*smallholder farmer*) dan sudah lanjut usia. Para petani juga turut memanfaatkan lahan pertanian yang disediakan oleh pihak kehutanan yang mereka sebut dengan *baun*..

Para petani di sini mengandalkan sistem *mangsa* (*pranata mangsa*) dalam menanam. Mereka hanya menanam di musim *rendheng* atau musim hujan. Penelitian ini sendiri berlangsung saat musim *mareng* atau kemarau basah—yang ditandai masih adanya hujan dengan intensitas rendah. Di musim ini sebagian warga masih melakukan aktivitas pertanian walaupun skalanya tidak sebesar saat *rendheng*. Saat *ketigo*, menurut para petani nyaris tidak ada kegiatan pertanian karena tidak ada hujan yang turun. Akan tetapi, saat *ketigo* mereka akan panen *tela* (singkong) yang ditanam saat *rendheng*. Selain *tela*, komoditas lain yang ditanam petani adalah jagung, kacang tanah, cabain dan *benguk*. Mereka masih menggunakan sistem *mangsa* lantaran sulitnya air saat puncak kemarau. Keberadaan dua mata air di perkampungan tidak bisa mengairi pertanian warga saat kemarau karena debitnya akan mengecil dan hanya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dari 450 penduduk.

Secara ekonomi, mayoritas masyarakat dusun Abang dapat dikatakan pra sejahtera atau miskin. Bu Tri, selaku ketua PKK yang kerap mengurus administrasi bantuan pemerintah, mengungkapkan ada empat jenis bantuan yang diterima masyarakat. (1) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) (2) Program Keluarga Harapan (PKH) (3), Bantuan raskin berupa beras 10 Kg/bulan. (4) Bantuan Langsung Tunai (BLT). Beberapa petani mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi mereka bergantung pada bantuan pemerintah

tersebut mengingat iklim yang sulit untuk menanam sepanjang tahun ditambah lagi kehadiran MEP yang membuat hasil panen mereka menurun.

Assemblage Multispesies

“Jadi kalau dulu to mas, itu gak pernah kemana-mana, kalau kethek [monyet] itu cuma di bukit kulon”. (Wawancara Pak W)

Menurut para petani, MEP sudah ada di dusun Abang sejak zaman nenek moyang mereka. Para MEP hidup di dua buah tebing (*lampeng*) yang sulit dijangkau oleh manusia. Dahulu, mereka hanya mencari makan di lahan pertanian yang persis di sarang mereka. Sebagian petani sudah menganggapnya sebagai hama sejak dahulu hingga pandangan tersebut muncul secara kolektif. Oleh karena itu masyarakat setempat mengenal adanya monyet *pajak'an*. Biasanya setiap tahun akan ada satu ekor monyet tua yang turun ke kampung. Monyet tersebut akan mati sendiri atau dibunuh oleh warga. Masyarakat menganggap hal tersebut merupakan ‘pajak’ atau tumbal dari monyet-monyet yang kerap memakan pertanian mereka.

Masyarakat merasa populasi MEP terus bertambah. Tahun demi tahun perambanan MEP terus meluas hingga semua petani terpaksa meninggalkan *talun/pekulen* dan pindah ke *baun*. Hal ini menandakan bahwa dusun Abang merupakan *contact zone* multispesies bagaimana agensi subjek di dalamnya saling bertransformasi satu sama lain (Haraway, 2008:219)

Pertemuan antara masyarakat MEP memang tidak tentu, dan selama saya di lapangan titik pertemuannya selalu berpindah-pindah. Menurut para petani MEP biasanya akan turun ke ladang saat musim jagung mulai berbuah. Selain itu, pak Dukuh Kusno menambahkan MEP biasanya akan turun ke perkampungan atau sungai saat musim kemarau untuk mencari air. Para petani pun mengenal MEP hewan yang adaptif. Sebelumnya mereka menggunakan jaring untuk menghalau gangguan MEP. Namun cara ini hanya bertahan 1-2 kali musim panen. Selebihnya MEP dapat meniru cara manusia masuk ke jaring tersebut.

Jika MEP datang ke lahan pertanian, para petani akan mengusirnya dengan alat seadanya, entah itu lewat suara teriak atau melemparnya dengan batu. Namun banyaknya pohon jati seringkali membuat petani kesulitan mengusirnya. MEP dikenal sebagai hewan arboreal. Kemelimpahan pohon jati membuat MEP lebih mudah bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain (Cant, 1988)

“Yo tanaman yang tidak menguntungkan bagi monyet, yang ga berbuah. Kaya jati itu kan cuma kayu-kayunya aja to mas...” (Wawancara Pak D)

Menurut para petani, tidak ada sumberdaya yang bisa dimanfaatkan oleh MEP di pepohonan jati. Keberadaan makanan MEP dalam ekosistem hutan jati sangat buruk karena sifatnya yang monokultur (Hasanbahri et.al, 1996 dikutip dalam Hadi et.al, 2007). Hal ini menandakan bahwa MEP sangat menggantungkan keberadaan makanan di lahan pertanian warga.

Sebagai bentuk penanganan terhadap perambanan MEP, pada tahun 2024 para petani memutuskan memelihara anjing. Menurut para petani kehadiran anjing dianggap efektif menghalau gangguan MEP. Kehadiran anjing membuat para petani kembali bisa

merasakan hasil panen. Akan tetapi, para MEP akan pergi ke wilayah pertanian lain—yang minim penjaagaan baik oleh manusia maupun anjing.

Respons dan Representasi

“*Parah-parah ke thek iku tahun 90-an*” (Wawancara Mbah J) (Parah-parahnya [gangguan] monyet itu tahun 90-an) Tanah *talun/pekulen* Mbah Suropto hanya berjarak 100meter dari sarang MEP. Sejak dahulu, ia harus menjaga lahan pertaniannya supaya para monyet tidak masuk. Ia mengingat ketika suatu hari tertidur saat menjaga lahan. MEP kemudian masuk dan menghabiskan tanaman bawang merah yang ia tanam di lahan 1000 M² dengan sekejap.

Hal inilah yang membuat dirinya kemudian berpindah hanya bertani di *baun* saja sejak tahun 1990-an. Lahan *talun/pekulen* yang ia tinggalkan kemudian diisi oleh jati. Memang menikmati hasil dari kayu jati butuh waktu lebih lama, setidaknya 15 tahun—bahkan agar kualitasnya layak untuk menjadi pondasi rumah baru dipanen setelah 25 tahun. Namun, mengisi *talun/pekulen* yang rentan dengan gangguan MEP menjadi opsi terbaik untuk mendapat keuntungan ekonomi karena mereka tidak perlu repot menjaganya serta tidak ada perawatan khusus. Dahulu, area pertanian di *baun* jauh lebih aman. Selain jaraknya yang lebih jauh dari sarang MEP, debit air sungai yang tinggi saat musim hujan tidak memungkinkan MEP untuk menyebrangnya.

“...Saya gak pernah menjaga, [lahan pertanaian saya] jauh dari bukit kulon itu... Yang dijaga itu dekat bukit kulon”. (Wawancara Mbah P)

Bagi mereka yang memiliki lahan pertanian yang lebih jauh dari sarang MEP tidak perlu repot menjaga karena kedatangan MEP sudah dijaga oleh petani yang menggarap di lahan yang lebih dekat dengan sarang MEP. Namun seiring berjalannya waktu, petani satu persatu mulai meninggalkan *talun/pekulen*. Hal ini kemudian membuat gangguan MEP menjadi lebih luas. Seiring berjalannya waktu gangguan ini dirasakan seluruh petani yang membuat seluruhnya pindah ke *baun*. Apalagi dalam 5 tahun terakhir petani merasa populasinya semakin banyak.

Dalam merespons gangguan MEP, tidak ada pencatatan yang mereka lakukan buat. Biasanya hanya akan diobrolkan di forum-forum warga. Mereka sudah mengadukan masalah ini ke padukuhan, kelurahan, hingga Dinas Pertanian, namun belum merasakan bantuan penanganan dalam bentuk apapun. Menurut para petani, Dinas Pertanian hanya menyarankan untuk membuat jebakan menangkap MEP, menanam tanaman yang membuat MEP mandul, serta menanam tanaman buah. Namun petani tidak pernah melakukan semua hal tersebut karena tidak memiliki biaya untuk melakukannya secara mandiri.

Di tingkat kelurahan pun tidak ada bentuk pencatatan atau pelaporan khusus. Menurut Pak lurah Kasman hal ini dikarenakan gangguan MEP terlalu banyak di desanya. Ia pun pernah meminta solusi ke berbagai instansi pemerintahan tingkat kabupaten. Jawabannya pun sama nyaris dengan yang diterima petani Dinas Pertanian, menanam tanaman buah dan menyediakan pakan alternatif. Menurutnya, hal ini tidak masuk akal karena warganya masih banyak yang kesulitan untuk makan. Untuk masalah ini, ia sudah menyerah dan tidak mewacanakan rencana apapun.

Masalah ini memang sudah menjadi atensi pemerintah kabupaten Gunungkidul mengingat besarnya sektor pertanian di wilayah tersebut. Misalnya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Gunungkidul 2025-2045, pemerintah setempat mengakui bahwa semakin meluasnya gangguan MEP di lahan pertanian Gunungkidul tidak lepas berbagai pembangunan infrastruktur yang merusak habitat MEP: Kendati menganggapnya sebagai hewan yang dilindungi namun pemerintah setempat masih menarisikannya sebagai hewan yang “meresahkan” masyarakat.

Dikarenakan pemerintah Gunungkidul masih kewalahan mengatasi masalah ini, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti, mengadukannya secara langsung ke Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) Triwulan II DIY pada 29 Juli 2025.

Menjawab keluhan tersebut, Menteri Pertanian mengaku memiliki cara mudah untuk mengatasinya, bahkan bisa selesai dalam waktu seminggu. Ia menceritakan bahwa dahulu pernah menangani gangguan babi hutan di Sumatra yang jumlahnya mencapai 2340 ekor. Akan tetapi ada ketakutan personal di dirinya untuk menggunakan cara yang sama.

Menteri Pertanian memang tidak menyebutkan metodenya secara jelas. Akan tetapi jika merujuk pada caranya dalam menangani masalah gangguan babi hutan, ia akan menggunakan racun temuannya. Artinya, jika ia mau menggunakan metode yang sama, ada indikasi kuat pembunuhan MEP secara masif.

Kendati IUCN sudah memasukkan MEP dalam daftar hewan yang terancam punah, namun Indonesia masih belum mengubah Peraturan Menteri Kehutanan No P106/2018 yang masih memasukan MEP ke daftar hewan yang tidak dilindungi. Dalam laporan Non-Detrimental Finding (NDF) For Long-Tailed Macaque in Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2023) menyimpulkan bahwa populasi MEP terbilang stabil, bahkan di habitat yang baik cenderung meningkat. Mereka melihatnya lewat tren kelahiran dan mortalitas, serta cuplikan data populasi dari penelitian-penelitian di berbagai wilayah di Indonesia selama di periode 2000-2022. Akan tetapi, laporan ini tetap tidak menunjukkan data dinamika populasi. Kendati turut menyoroti masalah perambahan yang turut dipengaruhi oleh degradasi habitat, namun laporan ini menjadi rekomendasi bahwa MEP masih bisa digunakan untuk dieksplor karena tidak mengancam populasinya.

Laporan NDF juga menegaskan bahwa MEP dilihat sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar untuk menghasilkan uang (Gunderson, 2011). Dalam perdagangan internasional, harga rata-rata MEP di pasar global selama 2010-2019 mencapai 2672 US \$ (Hansen et al, 2022b). Kebutuhan riset biomedis yang mendesak saat pandemi COVID-19 membuat harga MEP melonjak mencapai 24,000 US\$ (Warne et.al, 2023).

Sejauh ini belum ada kebijakan yang muncul terhadap rehabilitasi habitat MEP di Gunungkidul. Pak Lurah Kasman mengatakan banyaknya MEP di wilayah mereka pasca pembangunan Pelabuhan Gesing di 2020. Menurutnya, area tersebut juga merupakan habitat MEP. Namun lantaran ada proyek tersebut membuat habitat MEP di daerah tersebut rusak dan kabur ke desanya.

Tindakan MEP ini kemudian hanya direpresentasikan sebagai makhluk pengganggu oleh pihak yang berkuasa, alih-alih melihat sebagai makhluk yang sedang kehilangan habitat. Memang hewan tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa manusia

sehingga manusia yang berkuasa menjustifikasi status moral tertentu membuat MEP menjadi *subaltern* (Perlo, 2022). Kapitalisme kemudian mengeklusi MEP sebagai kesatuan dari alam Gunungkidul yang dikuantifikasi dan dirasionalisasi untuk terus melayani pertumbuhan ekonomi (Moore, 2015:14).

Dari uraian ini saya melihat pemerintah, khususnya di daerah Gunungkidul masih setengah hati dalam menangani permasalahan ini karena masih belum berupaya merehabilitasi habitat MEP secara nyata. Dalam dokumen RPJPD mereka tetap fokus untuk terus mengembangkan destinasi pariwisata. Hal ini diperkuat dengan data Informasi Pembangunan Gunungkidul yang dikeluarkan Bappeda yang menunjukkan tren kenaikan infrastruktur pariwisata (misalnya destinasi wisata, hotel, dan restoran) sepanjang 2020-2023. Pun pandangan status konservasi MEP antar tingkat pemerintah berbeda. Akan tetapi, pernyataan pemerintah Gunungkidul mengenai status MEP hewan yang dilindungi masih lemah karena tidak memiliki dasar hukum.

Konflik Kehutanan dan Petani

“Maksud saya, kalau bisa itu, monyetnya itu dikasih tempat khusus jadi biar gak mengganggu petani gitu. Apa dikasih pohon yang buat makan si kethek [monyet] gitu lho mas, buah-buahan kaya gitu, jadi mengalihkan dia makannya buat petani nanam itu lho mas”. (Wawancara Bu I).

Para petani pun paham bahwa perambananan MEP ke lahan pertanian tidak lepas karena makanan mereka di sarangnya tidak mencukupi. Pak Agus selaku ketua kelompok tani, mengungkapkan bahwa rencana penanaman buah pernah diobrolkan di forum kelompok tani. Namun hal tersebut tidak memungkinkan: (1) Petani tidak memiliki biaya untuk membeli bibit maupun merawatnya; (2) Pohon-pohon tersebut harus dijaga hingga berbuah. MEP sendiri mau memakan pucuk-pucuk daun muda dari pohon buah sehingga perlu dijaga dalam waktu yang lama. Apalagi penjagaan tersebut akan sulit di musim *rendheng*, saat petani sibuk mengolah lahan pertanian (3) Sebagian tanah milik masyarakat sudah dijual untuk pembangunan tempat wisata.

Di sisi lain, pihak kehutanan sebenarnya sudah pernah melakukan upaya penanaman buah di tahun 2023. Pak Sinder menjelaskan ke saya bahwa penanaman tersebut sebagai upaya pihak kehutanan menyediakan makanan untuk MEP. Hasil buahnya pun dapat dinikmati masyarakat. Akan tetapi ia menyayangkan minimnya partisipasi petani dalam penanaman dan perawatan sehingga banyak tanaman yang mati.

Namun, para petani memiliki pandangan lain. Pak Agus menjelaskan keengganan petani berpartisipasi karena melihat penanaman tersebut sebagai upaya pengusiran para petani yang menggarap di *baun*. Masalahnya penanaman pohon buah tepat berada di lahan pertanian masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pengalaman masa lalu petani saat mengikuti program penanaman Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH) di tahun 2004. Lewat program tersebut, petani diharuskan menanam jati di lahan *baun* mereka. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan pembukaan tanah garapan *baun* di wilayah lain.

Seiring jati mulai tumbuh, para petani sudah tidak bisa menanam *tumpang sari* di bawahnya. Menurut petani, mereka masih bisa *tumpang sari* dengan usia jati maksimal 5 tahun dan jika dipaksakan, hasil panennya akan buruk. Namun, setelah jati tumbuh besar masyarakat tidak pernah mendapatkan lahan *baun* yang dijanjikan.

Tidak hanya saat GNRHL, konflik para petani dan pihak kehutanan negara memang sudah jadi sejak abad 19. Kontrol kehutanan atas lahan tidak pernah menawarkan kesejahteraan untuk masyarakat yang hidup di sekitarnya sehingga memunculkan berbagai praktik resistensi (lihat Peluso, 1992). Bahkan obrolan soal menebang jati milik kehutanan untuk membuka lahan pertanian bukan sesuatu yang tabu diperbincangkan oleh masyarakat. Beberapa petani lanjut usia pun bercerita bahwa mereka sering mencuri kayu milik kehutanan ketika fisiknya masih prima. Mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah tindakan melawan hukum. Namun konteks saat ini, pembukaan lahan secara mandiri terpaksa mereka lakukan karena kebutuhan lahan pertanian. Bagi para petani, menanam di *talun/pekulen* saat ini tidak memungkinkan lantaran kehadiran MEP yang semakin banyak.

Kesimpulan

Fenomena perambahan MEP ke lahan pertanian di Gunungkidul bukanlah sekadar kompetisi perebutan sumberdaya antara petani dan hewan. Namun, ini adalah masalah ekologi-politik yang kompleks. Pembangunan beragam infrastruktur tidak pernah melihat keberadaan agensi non-manusia. Kegagalan dalam menangani masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun oleh institusi pemerintah lokal maupun pusat, menunjukkan adanya masalah struktural: (1) Kerentanan Ekonomi Petani: Keberadaan hutan negara tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak bagi petani. Dalam kondisi kemiskinan mereka sulit mengupayakan rehabilitasi lahan secara mandiri; (2) Ketidakpercayaan Terhadap Institusi Pemerintah: peristiwa reboisasi saat GNRHL memunculkan trauma dan melanggengkan konflik sehingga para petani memiliki interpretasi berbeda saat pihak kehutanan negara melakukan reboisasi tanaman buah; (3) Komodifikasi dan Representasi MEP: Baik pemerintah pusat maupun kabupaten terus melabeli MEP sebagai hewan “pengganggu” kehidupan manusia. Pemerintah kabupaten terkesan kontradiktif dengan melabeli MEP sebagai hewan yang dilindungi sembari terus mendorong pembangunan pariwisata tanpa adanya upaya rehabilitasi habitat MEP yang nyata. Di sisi lain pemerintah pusat melihat MEP sebagai komoditas yang masih bisa diekspor. Pemerintah seharusnya merekognisi bahwa MEP juga merupakan korban karena habitatnya hilang akibat pembangunan. Saat melakukan rehabilitasi habitat pemerintah pun harus menggunakan pendekatan bottom-up untuk melibatkan petani lokal secara aktif.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul (2024). Informasi Program Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024. Gunungkidul
- Badan Riset Inovasi Nasional & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023). Non-Detrimental Findings (NDF) For Long-Tailed Macaques (*Macaca Fascicularis*) in Indonesia. Jakarta
- BuddyKu (2023, Oktober 9) Profil Andi Amran Sulaiman, Eks Mentan Pendiri Tiran Group. RCTI+, <https://www.rctiplus.com/news/detail/olahraga/4064173/profil-andi-amran-sulaiman-eks-mentan-pendiri-tiran-group>

- Cant, J.G.H. (1988). Positional Behavior of Long-Tailed Macaques (*Macaca fascicularis*) in Northern Sumatra. *American Journal of Physical Anthropology* 76, 29-37. [10.1002/ajpa.1330760104](https://doi.org/10.1002/ajpa.1330760104)
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta & Multi Lisensi (2024). Laporan Akhir Kajian Penanganan Monyet Ekor Panjang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
- Fuentes, A. (2006). Human-Nonhuman Primate Interconnections and Their Relevance to Anthropology. *Ecological and Environmental Anthropology* 2(2), 1-11
- Gunderson, R. (2011). From Cattle to Capital: Exchange Value, Animal Commodification, and Barbarism. *Critical Sociology* 39(2), 259-275. <https://doi.org/10.1177/08969205114210>
- Hadi, I., Suryobroto, B., & Perwitasari-Fajarallah, D. (2007). Food Preference of Semi-Provisioned Macaques Based on Feeding Duration and Foraging Party Size. *Hayati* 14(1), 13-17. <https://doi.org/10.4308/hjb.14.1.13>
- Hansen, M. F., Gill, M., Briefer, E.F., Nielsen, D.R.K. & Nijman, V. (2022). Monetary Value of Live Trade in a Commonly Traded Primate, the Long-Tailed Macaque, Based on Global Trade Statistics. *Frontiers in Conservation Science* 3:839131. <https://doi.org/10.3389/fcosc.2022.839131>
- Hansen, M.F., Ang, A., Trinh, T., Sy, E., Paramasiwam, S., Ahmed, T., Dimalibot, J., Jones-Engel, L., Ruppert, N., Griffioen, C., Lwin, N., Phiapalath, P., Gray, R., Kite, S., Doak, N., Nijman, V., Fuentes, A. & Gumert, M.D. 2022. *Macaca fascicularis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2022:e.T12551A199563077. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20221.RLTS.T12551A199563077.en>
- Haraway, D.J. (2008). *When Species Meet*. Minneapolis dan London: University of Minnesota Press
- Hockings, K.J. (2017). Mitigating Human–Nonhuman Primate Conflict, dalam Agustin Fuentes (ed.) *The International Encyclopedia of Primatology*. John Wiley & Sons. PP: 1-8
- Juliastuti, N. (2024). *Stories of Wounds and Wonder*. Amsterdam: If I Can't Dance
- Kirksey, E. & Helmreich, S. (2010). The Emergence of Multispecies. *Cultural Anthropology* 25(4): 545-576. [10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x](https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x)
- KompasTV (2025, Juli 30) [FULL] Dialog Mentan Amran dengan Bupati Gunungkidul-Gubernur Yogya, Singgung Monyet-Irigasi [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=LFxd14cKXGo&t=704s>
- Moore, Jason W (2015). *Capitalism in the Web of Life*. Verso
- Peluso, N.L. (1992). *Rich Forest, Poor People*. University of California Press
- Perlo, K. (2022). What is the Animal Class? : Idea, Position, Goal. *Politics and Animals* 8, 1-13
- Ramsay, M.A., Malabet, F.M., Klass, K., Ahmed, T. & Muzaffar, S. (2023). Consequences of Habitat Loss and Fragmentation for Primate Behavioral Ecology, dalam Tracie McKinney, Sian Waters, dan Michelle A. Rodrigues (eds.) *Primates in Anthropogenic Landscapes* Springer. Pp: 9-28

- Rifaie, F. , Sulistyadi, E., Fitriana, Y.S., Inayah, N., Maharadatunkamsi, M., Prameswari, W. & Rusmadipraja, I.A. (2024). Spatial patterns of human—long-tailed macaque (*Macaca fascicularis*) conflicts in Java Island: A comparison of two secondary data sources. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity* 17, 653-662. <https://doi.org/10.1016/j.japb.2024.05.008>
- Riley, E. P. (2018). The Maturation of Ethnoprimatology: Theoretical and Methodological Pluralism. *International Journal of Primatology* 39, 705-729. <https://doi.org/10.1007/s10764-018-0064-4>
- Riley, E.P., Loria, L.I., Radhakrishna, S., & Sengupta, A. (2023) Shared Ecologies, Shared Futures: Using the Ethnoprimatological Approach to Study Human-Primate Interfaces and Advance the Sustainable Coexistence of People and Primates, in Tracy McKinney, Sian Waters, dan Michelle A Rodrigues (eds.) *Primates in Anthropogenic Landscapes*. Springer. Pp: 203-224
- Robinson, Paul (2012). *Political Ecology* [2nd ed]. Wiley-Blackwell
- Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Gunungkidul 2025-2045*. Gunungkidul
- Swanson, H.A. (2014). Methods for Species Anthropology: Thinking with Salmon Otolith and Scales. *Social Analysis: The International Journal of Anthropology* 61(2), 81-99. <http://www.jstor.org/stable/26404929>
- Tsing, A. L. (2015) *The Mushroom at the End of the World*. Princeton University Press
- Warne, R.K., Moloney, G.K. & Chaber, A. (2023). Is biomedical research demand driving a monkey business?. *One Health* (16), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2023.100520>
- Wulandari, D. (2024) Koesistensi Manusia dan Kera Ekor Panjang: Studi Multispecies di Kampung Pitu, Nglanggeran. *Jurnal Zona* 8 (1), 1-7. <https://doi.org/10.52364/zona.v8i1.104>